

EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA BARAT

Indira Septiani¹, Neneng Weti Isnawaty²

^{1,2}Program Studi Administrasi Keuangan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

Email Korespondensi : indira21002@mail.unpad.ac.id¹, nenengwety@gmail.com²

Submitted: 16-01-2025; Accepted: 29-01-2025; Published : 31-01-2025

ABSTRAK

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat merupakan alat strategis dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas penggunaan SIPD melalui enam dimensi menurut model McLean & Delone tahun 2003 yang terdiri dari kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas pelayanan, kegunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi terhadap pengguna SIPD di lingkungan Sekretariat DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah membantu pengelolaan data keuangan secara terstruktur dan meningkatkan efisiensi administrasi. Namun, kendala seperti kesalahan input manual, keterbatasan fitur dibandingkan aplikasi sebelumnya (SIPKD), ketidakstabilan server, dan kurangnya integrasi sistem masih menghambat efektivitasnya. Tantangan semakin besar dengan implementasi SIPD RI pada tahun 2025, yang membutuhkan proses transisi manual dan kesiapan pengguna. Dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan menggunakan SIPD memerlukan peningkatan sistem, integrasi fitur, pelatihan intensif, serta penyediaan dukungan teknis yang responsif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Efektivitas, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

ABSTRACT

The Regional Government Information System (Sistem Informasi Pemerintah Daerah or SIPD) at the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) of West Java Province is a strategic tool to support transparency and accountability in regional financial management. This study aims to evaluate the effectiveness of SIPD implementation through six dimensions based on the McLean & DeLone model (2003), which include information quality, system quality, service quality, use, user satisfaction, and net benefits. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through interviews and observations of SIPD users within the DPRD Secretariat. The findings indicate that SIPD has facilitated structured financial data management and improved administrative efficiency. However, challenges such as manual input errors, feature limitations compared to the previous application (SIPKD), server instability, and lack of system integration still hinder its effectiveness. The challenges are expected to increase with the implementation of SIPD RI in 2025, which requires a manual transition process and user readiness. Optimizing financial management using SIPD requires system improvements, feature integration, intensive training, and responsive and sustainable technical support.

Key word: Effectiveness, Regional Financial Management, Regional Government Information System (SIPD)

PENDAHULUAN

Sistem informasi menjadi salah satu elemen penting dalam menghadapi era globalisasi saat ini, ketika teknologi berkembang pesat dan kebutuhan manusia semakin kompleks di era digital. Dengan munculnya berbagai inovasi terutama teknologi, aktivitas manusia menjadi lebih mudah, cepat dan efisien. Kemajuan teknologi informasi menuntut perubahan pada pola dan cara dilakukannya kegiatan disegala sektor, industri, perdagangan, terutama pemerintahan (Ramadhan et al., 2019).

Sistem informasi merupakan integrasi teknologi informasi dengan kegiatan manusia yang memanfaatkan teknologi tersebut untuk mendukung operasional dan manajemen dalam mencapai suatu tujuan (Magrid Rompas, 2020). Tujuan utama dari penggunaan sebuah sistem informasi, menurut Rusdiana (2014), adalah untuk mempermudah proses pengolahan data dalam suatu lembaga, perusahaan, atau badan usaha untuk berbagai keperluan, terutama dalam pengambilan keputusan.

Mengikuti kemajuan teknologi saat ini, pemerintah terus berupaya menyempurnakan sistem yang digunakan dalam proses kegiatannya agar dapat berjalan secara optimal. Langkah ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai setiap program yang dilaksanakan. Sistem informasi menjadi salah satu penunjang penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka. Transparansi merupakan syarat dari terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik. Direktorat Jenderal Anggaran (2023) menegaskan bahwa transparansi akan memudahkan masyarakat mengakses informasi, sehingga mempermudah dan meningkatkan partisipasi mereka dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan publik.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka mendukung dan mengawal proses otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam mengelola keuangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas setiap daerahnya (Shara Ningsih et al., 2023). Sistem informasi menjadi sarana bagi Pemerintah Pusat untuk mengawasi secara langsung dan *real-time* proses pengelolaan dan penyerapan APBD dari setiap Pemerintah Daerah. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk keterbukaan informasi keuangan daerah, diharapkan dapat

tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap perubahan. Hal ini diwujudkan melalui penggunaan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) sebagai alat pengelolaan keuangan daerah.

SIPD pertama kali diluncurkan pada Oktober 2019 sebagai perwujudan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 391, yang mengharuskan Pemerintah Daerah menyediakan informasi tentang Pemerintahan Daerah melalui suatu Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, dijelaskan bahwa SIPD adalah sistem informasi yang mencakup pengelolaan data terkait Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah, dan berbagai informasi pemerintah daerah lainnya yang terintegrasi untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah (Sub Bagian Hukum BPK Sumatera Selatan, 2019).

Sistem Informasi Pemerintah Daerah diharapkan bisa membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pelaksanaan berbagai peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi ini dirancang agar pengelolaan keuangan setiap Perangkat Daerah dapat mengelola dana dengan didasarkan pada prinsip-prinsip seperti efisiensi, ekonomi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan auditabilitas sesuai dengan asas pengelolaan keuangan (Ryas, 2023). Tujuan utama dari sistem ini yaitu membuat APBD lebih transparan serta mengurangi peluang penyalahgunaan, karena sistem ini dibuat lebih terbuka. SIPD menjadi sebuah sistem untuk menciptakan *Good Governance* dalam pelaksanaan negara yang transparan, dan bertanggungjawab.

Sejak tahun anggaran 2021, penggunaan SIPD mulai diterapkan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Peraturan ini menekankan betapa pentingnya memiliki data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah yang tepat, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi di setiap daerah. Namun, implementasi di Sekretariat DPRD Jawa Barat belum sepenuhnya efektif karena adanya beberapa kendala, terutama dalam penyajian informasi laporan keuangan dan kendala pada sistem selama proses penatausahaannya.

Fenomena perubahan sistem pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa

Barat, dari penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) menuju penerapan SIPD, menjadi salah satu tantangan dalam proses pengelolaan keuangan. Kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD mengharuskan pemerintah daerah untuk menyesuaikan diri dengan sistem baru. Pasalnya, pada aplikasi sebelumnya yaitu SIPKD menyediakan fitur-fitur lengkap yang mencakup seluruh proses pencatatan keuangan, mulai dari pencatatan jurnal harian hingga penyusunan laporan.

Selain perubahan dari SIPKD ke SIPD, tantangan baru muncul dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaan SIPD RI mulai tahun anggaran 2025. SIPD RI, yang dirancang sebagai aplikasi umum, tidak hanya dapat digunakan oleh pemerintah daerah seperti SIPD, tetapi juga dirancang untuk mendukung kementerian/lembaga lain sebagai upaya menyatukan berbagai aplikasi yang tersebar di banyak institusi (Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, 2023). Namun, dalam proses transisi ini, tidak tersedia fitur integrasi langsung antara SIPD dan SIPD RI, sehingga proses perpindahan data menjadi tantangan tersendiri. Perubahan ini kembali memaksa Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menyesuaikan diri dengan sistem baru, termasuk mempersiapkan sumber daya manusia dan menyesuaikan alur kerja dengan fitur-fitur yang ada pada SIPD RI.

Berdasarkan wawancara dengan pegawai di Bidang Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, kendala-kendala teknis pada sistem berdampak pada keterlambatan proses verifikasi dan pelaporan keuangan. Selain itu, fitur-fitur yang terbatas pada SIPD mengharuskan beberapa proses dilakukan secara manual, yang bertentangan dengan tujuan awal sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi.

Dari indikasi permasalahan yang muncul tersebut selama penggunaannya di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dampak yang dirasakan dalam penatausahaan pelaporan keuangan yaitu kesulitan dalam melakukan Ganti Uang (GU) saat Uang Persediaan (UP) menipis karena proses verifikasi terhambat. Kemudian membuat proses pelaporan dari pengelolaan keuangan sering terlambat secara sistem untuk diserahkan kepada BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.

Dalam penelitian mengenai SIPD di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat ini, berdasarkan hasil temuan lapangan, muncul berbagai permasalahan terkait penggunaan SIPD. Meskipun SIPD bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi, kendala yang ditemukan sejalan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian oleh Setyawan (2023), di Kabupaten Gianyar menunjukkan bahwa penerapan SIPD belum efektif karena kurangnya sosialisasi rutin, pelatihan, serta keterbatasan keahlian tenaga pendamping dan ASN. Sementara itu, penelitian oleh Pandan Wangi (2023), di Kabupaten Semarang menemukan bahwa penggunaan SIPD belum optimal akibat infrastruktur teknologi dan perangkat lunak yang tidak memadai, sehingga pelaporan masih mengandalkan sistem ganda. Penelitian Nalle (2023), di Kabupaten Kupang juga menyimpulkan bahwa efektivitas SIPD terhambat oleh kurangnya pelatihan dan kendala teknis, termasuk akses internet yang tidak stabil.

Walaupun telah merujuk pada berbagai penelitian sebelumnya, penelitian ini menawarkan sudut pandang lainnya dengan mengangkat isu spesifik yang terjadi di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah menggunakan SIPD dari perspektif pengguna. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek sosialisasi, pelatihan, sementara penelitian ini menitikberatkan pada dimensi pengalaman pengguna serta kualitas sistem. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan mengenai efektivitas SIPD di berbagai perangkat daerah sekaligus mengidentifikasi kendala serta peluang untuk pengembangan ke depan.

Alternatif solusi untuk mengatasi kendala ini meliputi pengembangan fitur tambahan pada sistem informasi selanjutnya yang digunakan agar dapat memenuhi kebutuhan spesifik pengguna, seperti fitur integrasi data antara SIPD dan SIPD RI. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas server untuk mengurangi gangguan teknis yang sering terjadi, terutama pada waktu-waktu krusial.

Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat (Indira Septiani, Neneng Wety Isnawaty)

No.	Dimension The DeLone and McLean Model of Information System Success
1.	<i>Information Quality: Information quality was measured in terms of accuracy, timeliness, completeness, relevance, and consistency.</i>
2.	<i>System Quality: System quality was measured in terms of ease of use, functionality, reliability, flexibility, data quality, portability, integration, and importance.</i>
3.	<i>Service Quality: This instrument uses the dimensions of tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy to measure service quality.</i>
4.	<i>Use/Intention to Use: Use is measured in amount of use, frequency of use, nature of use, appropriateness of use, extent of use, and purpose of use.</i>
5.	<i>User Satisfaction: users' level of satisfaction with reports, System, and support services</i>
6.	<i>Net Benefit: group all the "impact" measures into a single impact or benefit category called "net benefits."</i>

Gambar 1. *The DeLone and McLean Model of Information Systems Success*

Penelitian ini menggunakan teori dimensi efektivitas sistem informasi yang dikemukakan oleh McLean & Delone (2003) yang mengidentifikasi enam dimensi utama: Kualitas Informasi, Kualitas Sistem, Kualitas Pelayanan, Kegunaan, Kepuasan Pengguna, dan Manfaat Bersih untuk mengevaluasi efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.

Efektivitas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada tingkat pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam konteks sistem informasi, efektivitas adalah sejauh mana sistem dapat membantu aktivitas lembaga atau organisasi dalam mencapai tujuannya (Pambudi, 2005).

McLean & Delone (2003) mendefinisikan efektivitas sistem informasi sebagai sejauh mana sistem mampu mendukung kinerja organisasi atau penggunaannya dengan optimal. Evaluasi efektivitas sistem ini penting dilakukan pasca-implementasi untuk menilai apakah tujuan sistem, seperti meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan sumber daya, telah tercapai (Sahfitri, 2012). Pendekatan ini melibatkan analisis dimensi-dimensi utama, termasuk kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas pelayanan, kegunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih.

Dengan mengacu pada teori ini, penelitian tidak hanya mengevaluasi aspek teknis dari SIPD tetapi juga mengidentifikasi kendala dan solusi untuk meningkatkan efektivitas sistem, sehingga dapat mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini diharapkan

memberikan kontribusi penting bagi pengembangan dan implementasi sistem informasi di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis fenomena penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan tiga pegawai di Bagian Keuangan yang berperan sebagai pengguna SIPD secara rutin dan melalui observasi langsung terhadap proses pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan wawasan mendalam mengenai efektivitas dan kendala penggunaan SIPD. Data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal, peraturan, serta dokumen terkait seperti sejarah singkat, visi dan misi, serta struktur organisasi Sekretariat DPRD. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara tatap muka untuk memahami pandangan dan pengalaman pengguna terhadap efektivitas SIPD, serta observasi partisipatif untuk mengamati penggunaan SIPD secara langsung. Kombinasi sumber data ini menghasilkan analisis yang mendalam mengenai pengelolaan keuangan berbasis sistem informasi di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.

Teknik analisis data mengacu pada tahapan yang dijelaskan oleh Sugiyono (2022), meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan mengelompokkan informasi yang relevan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk mempermudah analisis lebih lanjut. Hasil akhirnya adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan di lapangan, yang memberikan gambaran mengenai efektivitas dan kendala penggunaan SIPD serta rekomendasi untuk perbaikan sistem ke depannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem informasi merupakan sistem yang dirancang oleh manusia, terdiri atas unsur manual dan teknologi komputer, untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan

menghasilkan informasi yang mendukung pencapaian tujuan tertentu (Kadir, 2014). Menurut Wilkinson dalam (Yunitarini, 2021), sistem informasi adalah struktur yang mengintegrasikan manusia dan komputer untuk mengolah data menjadi informasi yang dibutuhkan organisasi. Dengan demikian, sistem informasi melibatkan komponen manusia, teknologi, informasi, dan prosedur kerja.

Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, SIPD adalah sistem informasi yang memuat data pembangunan daerah, keuangan daerah, dan pemerintahan daerah lainnya yang terintegrasi secara nasional. SIPD dirancang untuk mendukung pembangunan daerah dengan menyajikan layanan informasi pemerintahan secara elektronik. Ruang lingkup SIPD meliputi tiga aspek utama.



Gambar 2. Menu Tampilan Awal SIPD

Pertama, Informasi Pembangunan Daerah, mencakup data perencanaan pembangunan, analisis, profil pembangunan, dan dokumen perangkat daerah. Kedua, Informasi Keuangan Daerah, meliputi pengelolaan dokumen keuangan dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, hingga pelaporan keuangan. Ketiga, Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya, seperti laporan penyelenggaraan pemerintahan, evaluasi kinerja pemerintah daerah, dan regulasi daerah.

Penelitian ini membahas efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, yang dirancang untuk mendukung pengelolaan keuangan secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. SIPD memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas administrasi keuangan daerah. Untuk menganalisis efektivitasnya, penelitian

ini menggunakan teori McLean & Delone, (2003), yang mengidentifikasi enam dimensi utama: Kualitas Informasi, Kualitas Sistem, Kualitas Pelayanan, Kegunaan, Kepuasan Pengguna, dan Manfaat Bersih. Dimensi-dimensi ini memberikan kerangka evaluasi yang relevan terhadap penerapan SIPD dari perspektif pengguna dalam mendukung tata kelola keuangan yang baik.

Kualitas Informasi (*Information Quality*) Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Salah satu dimensi dalam efektivitas sebuah sistem informasi menurut McLean & Delone, (2003) adalah kualitas informasi yang dihasilkan. Dalam konteks Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), kualitas informasi mengacu pada sejauh mana informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut memenuhi kebutuhan pengguna, terutama dalam hal akurasi, relevansi, kelengkapan, dan ketepatan waktu. Kualitas informasi yang baik memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien, yang sangat penting untuk mendukung pengelolaan keuangan dan pelaporan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk menilai kualitas informasi dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dapat dilakukan analisis terhadap beberapa aspek yang mencerminkan kualitas informasi yang dihasilkan. Beberapa aspek yang dapat menunjukkan kualitas informasi dari suatu sistem informasi meliputi:

1. Akurasi Informasi

Akurasi informasi mengacu pada sejauh mana informasi yang dihasilkan oleh sistem mencerminkan data yang benar dan bebas dari kesalahan. Dalam konteks SIPD di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, akurasi informasi sangat penting untuk memastikan data yang disajikan dapat diandalkan dalam mendukung pengelolaan keuangan dan pelaporan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Informasi yang akurat menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat, terutama terkait anggaran dan penggunaan dana.

Keakuratan informasi SIPD sangat dipengaruhi oleh kualitas input data yang

dimasukkan oleh pengguna. Setiap transaksi atau kegiatan harus diinput dengan benar dan lengkap, mulai dari penyediaan dana, permohonan pembayaran, hingga pelaporan. Dokumen seperti Tanda Bukti Pembayaran (TBP), yang meliputi kwitansi, faktur, dan dokumen pendukung lainnya, sangat penting dalam proses ini. Namun, dalam praktiknya, masih terjadi kesalahan input seperti angka, nomor surat, atau kode yang dapat memengaruhi akurasi informasi. Selain itu, SIPD belum memiliki fitur deteksi kesalahan input atau data ganda, sehingga proses verifikasi data masih dilakukan secara manual, menggunakan perangkat lunak seperti Excel.

Kesalahan input yang tidak terdeteksi dapat menyebabkan informasi yang tidak akurat, memengaruhi pengambilan keputusan dan pelaporan keuangan. Kendala teknis juga menjadi faktor yang memengaruhi akurasi, seperti data yang hilang atau tidak tercatat dengan benar meskipun sudah diinput, termasuk pada dokumen TBP. Meskipun SIPD telah mengalami perbaikan secara bertahap, perbaikan sistem masih diperlukan untuk memastikan akurasi informasi yang lebih baik.

2. Kelengkapan, Ketepatan Waktu, dan Relevansi Informasi

Kelengkapan informasi dalam SIPD merujuk pada kemampuan sistem untuk menyediakan data yang dibutuhkan secara penuh tanpa ada yang terlewat. Informasi lengkap sangat penting untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam penganggaran, pelaporan, dan perencanaan. Kekurangan data dapat menghambat proses dan menyebabkan keputusan yang kurang tepat. Namun, dalam praktiknya, sering kali data yang diperlukan tidak tersedia atau tidak lengkap, seperti dokumen pendukung yang terlambat dikumpulkan, misalnya faktur pajak atau tanda tangan pejabat. Hal ini dapat menghambat penatausahaan dan memengaruhi kelancaran verifikasi serta penyajian laporan keuangan. Masalah lain seperti pergeseran anggaran juga dapat menyebabkan ketidaksesuaian data yang mengharuskan koreksi manual, sehingga mengurangi efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan.

Ketepatan waktu dalam penyediaan informasi juga sangat penting. Informasi yang tepat waktu membantu pengambilan keputusan

lebih efisien. Dalam SIPD, keterlambatan input data sering mengganggu verifikasi dan pelaporan, yang pada akhirnya dapat menunda pencairan dana atau pengelolaan anggaran. Idealnya, data kegiatan harus dimasukkan sebelum tanggal 10 setiap bulan untuk menghindari masalah, tetapi keterlambatan sering terjadi akibat kesibukan administrasi, keterbatasan sumber daya, atau masalah teknis dalam SIPD.

Relevansi informasi juga menjadi faktor penting dalam kualitas informasi SIPD. Data yang relevan adalah data yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam pengelolaan keuangan, relevansi data memastikan pengguna dapat langsung mengambil keputusan tanpa memerlukan banyak koreksi. Meskipun SIPD umumnya menyediakan data yang relevan, perubahan data yang belum diperbarui, seperti dalam surat pencairan dana (SPD), dapat memerlukan koreksi manual, menambah beban kerja, dan mengurangi efisiensi pengelolaan keuangan.

3. Konsistensi Informasi

Konsistensi informasi mengacu pada penyajian data yang seragam dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi dapat diandalkan dan mudah dipahami oleh pengguna, sehingga mengurangi kesalahan interpretasi dan meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. Dalam SIPD, konsistensi informasi telah ditangani dengan baik meskipun ada tantangan awal, terutama karena kompleksitas sistem yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem sebelumnya (SIPKD). Setelah pengguna beradaptasi, data dapat diproses dengan lancar dan informasi yang disajikan tetap konsisten.

Meskipun aspek relevansi dan konsistensi informasi pada SIPD cukup baik, peningkatan dalam akurasi, kelengkapan, dan ketepatan waktu masih diperlukan untuk memastikan efektivitas SIPD dalam mendukung pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.

Kualitas Sistem (*System Quality*) Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Dalam menilai efektivitas sebuah sistem informasi, kualitas sistem merupakan salah satu dimensi yang krusial. Sebagai alat atau sarana

dalam manajemen, sebuah sistem informasi harus berfungsi dengan baik untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Kualitas sistem yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja pengguna serta memberikan dampak positif terhadap kepuasan dan manfaat yang diperoleh dari penggunaan sistem informasi tersebut. Oleh karena itu, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) diharapkan dapat memberikan efisiensi kerja dan manfaat yang optimal bagi para penggunanya.

Dalam teori dari McLean & Delone, (2003) untuk menggambarkan kualitas sistem dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terdapat 6 (enam) indikator yang dapat digunakan seperti:

1. Kemudahan Penggunaan Sistem

Kemudahan penggunaan dalam SIPD menjadi faktor utama dalam memastikan sistem dapat digunakan dengan lancar oleh pengguna. Sistem yang mudah digunakan akan meningkatkan efisiensi kerja pengguna dan meningkatkan manfaat yang diperoleh dari penggunaannya. Kemudahan penggunaan SIPD dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sosialisasi awal, pengalaman sistem sebelumnya, dan aksesibilitas fitur-fitur dalam sistem.

Di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, SIPD dinilai mudah digunakan secara umum. Namun, untuk pengguna baru, terutama pegawai yang tidak terbiasa dengan sistem ini, sosialisasi dan pelatihan menjadi sangat penting. Meskipun tersedia panduan tertulis, sosialisasi langsung lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman pengguna terhadap fitur-fitur yang tersedia dalam sistem. Sosialisasi yang dilakukan pada awal peluncuran sistem telah terbukti efektif, namun sosialisasi lanjutan masih diperlukan, terutama ketika ada fitur baru yang diperkenalkan.

Namun demikian, penggunaan SIPD pada awalnya dinilai lebih rumit dibandingkan dengan sistem sebelumnya, yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). SIPD juga memerlukan penggunaan manual aplikasi lain, seperti Microsoft Excel, yang menambah waktu pengerjaan. Secara keseluruhan, meskipun SIPD dinilai mudah digunakan, sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan sangat diperlukan agar sistem

dapat digunakan secara optimal, terutama bagi pegawai baru.

2. Fungsionalitas Sistem

Fungsionalitas sistem merujuk pada kemampuan SIPD untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional pengguna, khususnya dalam pengelolaan data keuangan dan administrasi. Fitur yang ada dalam sistem harus dapat mengakomodasi kebutuhan pengelolaan data seperti pencatatan, verifikasi, dan pelaporan, serta dapat meningkatkan efisiensi kerja.

Di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, fitur-fitur dalam SIPD dianggap sudah cukup memadai untuk mendukung tugas verifikasi dana. Namun, masih ada beberapa kekurangan dalam fungsionalitas SIPD, terutama di bagian pengeditan dan penghapusan data. Fitur edit yang sangat diperlukan, terutama ketika terjadi kesalahan dalam data SPP atau SPM, masih belum tersedia di SIPD. Pengguna masih harus menghapus data dan membuat ulang dokumen, yang mengurangi efisiensi waktu dan proses kerja.

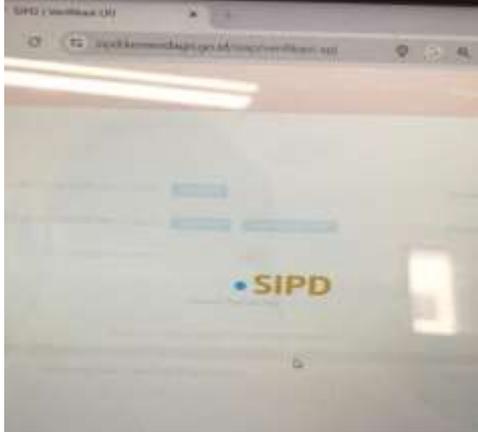
Selain itu, dalam hal pelaporan, SIPD juga masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pelaporan yang lebih rinci, seperti permintaan dari BPK. Salah satu fitur yang diharapkan adalah Rincian Objek Belanja (ROB) yang lebih lengkap, yang tidak tersedia di SIPD. Tanpa fitur ini, pengguna harus memilih kode rekening secara manual untuk setiap transaksi, yang memperlambat proses pelaporan dan menambah beban kerja.

Secara keseluruhan, meskipun SIPD menyediakan fitur dasar yang diperlukan, terdapat kebutuhan untuk pengembangan lebih lanjut agar fungsionalitasnya semakin mendukung efisiensi dan kelengkapan pelaporan.

3. Keandalan Sistem

Keandalan SIPD terlihat dari kemudahan akses dan kemampuannya memenuhi kebutuhan pengguna kapan saja diperlukan, khususnya dalam mendukung pengelolaan keuangan dan informasi. Keandalan menjadi aspek utama kualitas SIPD, dengan memastikan sistem selalu siap digunakan. Meskipun keandalan sistem telah meningkat, tantangan terkait stabilitas masih sering muncul, terutama pada saat penggunaan tinggi, seperti akhir bulan dan akhir

tahun. Pada tahun 2022, error sistem sering terjadi, terutama saat proses verifikasi, yang menyebabkan keterlambatan dalam kebutuhan mendesak seperti Ganti Uang (GU) di tengah menipisnya dana persediaan. Gangguan ini telah berkurang dalam beberapa waktu terakhir.



Gambar 3. Tampilan SIPD Saat Terjadinya Error

Masalah error paling sering terjadi pada awal penerapan SIPD (2022 hingga awal 2023), terutama akibat pemeliharaan atau pengembangan sistem. Meski sekarang lebih jarang, error tetap terjadi saat beban penggunaan meningkat, seperti pergeseran anggaran atau banyaknya pengajuan dan pelaporan. Saat proses pergeseran anggaran, input data kadang terhambat, dengan durasi error mencapai satu minggu. Menjelang akhir tahun, durasi error biasanya lebih singkat, sekitar tiga hari.

Secara keseluruhan, meskipun keandalan SIPD menunjukkan kemajuan, gangguan teknis masih menjadi perhatian, terutama pada periode penggunaan tinggi. Stabilitas sistem perlu terus ditingkatkan untuk memastikan keandalan yang optimal dan meminimalkan penundaan dalam pengelolaan keuangan.

4. Fleksibilitas dan Portabilitas Sistem

Fleksibilitas dan portabilitas adalah aspek kunci dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang mendukung kinerja dan aksesibilitas bagi pengguna. Fleksibilitas memungkinkan SIPD diakses dari berbagai lokasi, baik di kantor, lapangan, atau saat bekerja jarak jauh, sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses data secara real-time tanpa terikat pada satu tempat. Portabilitas merujuk pada kemampuan SIPD untuk diakses melalui berbagai perangkat, seperti komputer, tablet, atau smartphone, tanpa mengurangi

fungsionalitas sistem. Hal ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk terhubung kapan saja dan di mana saja, meningkatkan efisiensi pengelolaan data serta mempercepat pengambilan keputusan yang lebih responsif.

Sistem berbasis web ini memungkinkan akses melalui berbagai perangkat yang memiliki koneksi internet dan browser yang kompatibel, yang memberi keuntungan utama berupa fleksibilitas dalam penggunaan. Pengguna dapat mengakses SIPD tidak hanya di kantor, tetapi juga saat berada di lapangan atau dalam perjalanan dinas, memberikan kemudahan bagi mereka yang sering bergerak. Akses di luar lingkungan kantor ini meningkatkan efisiensi operasional, membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan mendukung responsivitas yang lebih tinggi.

Meskipun sistem SIPD mendukung penggunaan perangkat yang beragam, dalam praktiknya terdapat preferensi terhadap perangkat dengan layar lebih besar, seperti komputer atau laptop, karena kenyamanan visual dan kemudahan navigasi yang lebih baik. Sementara itu, penggunaan perangkat dengan layar kecil, seperti ponsel, dapat mengurangi kenyamanan karena keterbatasan ukuran layar dan resolusi, yang mempengaruhi navigasi dan memperlambat pengalaman penggunaan. Namun, meskipun ada perbedaan kenyamanan dalam menggunakan perangkat, portabilitas dan fleksibilitas SIPD tetap memberikan keuntungan signifikan dalam mendukung kinerja pengguna yang lebih efisien dan responsif.

Dengan demikian, meskipun faktor kenyamanan perangkat tetap penting, portabilitas dan fleksibilitas yang dimiliki SIPD memberi kontribusi besar dalam meningkatkan kinerja, efisiensi, dan responsivitas, memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola data dengan lebih mudah di berbagai kondisi dan tempat.

5. Integrasi Sistem

Integrasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dengan sistem sebelumnya dan yang akan datang sangat penting untuk kelancaran transisi dan kesinambungan pengelolaan data pemerintahan. Dalam hal pengelolaan keuangan perangkat daerah, SIPD harus dapat memindahkan data dari sistem lama agar informasi historis tetap dapat diakses. Proses ini tidak hanya melibatkan pemindahan

data, tetapi juga memastikan kesesuaian format dan struktur data dengan ketentuan SIPD, sehingga menghindari kehilangan atau ketidaksesuaian informasi.

Namun, dalam praktiknya, integrasi SIPD dengan sistem sebelumnya, seperti SIPKD, dan dengan sistem SIPD RI yang direncanakan pada tahun anggaran 2025, menghadapi kendala. SIPD saat ini belum dapat mengintegrasikan data secara langsung dari SIPKD atau sistem lain yang digunakan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Data dari SIPKD tidak dapat dipindahkan secara otomatis, sehingga harus diinput ulang secara manual. Tantangan ini cukup besar, mengingat banyaknya data yang harus dimasukkan kembali, yang bisa menambah beban kerja dan waktu.

Selama transisi dari SIPKD ke SIPD, hanya data anggaran yang bisa diintegrasikan, sementara transaksi dan dokumen penatausahaan lainnya harus dimasukkan satu per satu. Proses input manual yang besar ini memakan waktu dan menjadi hambatan, terutama untuk transaksi dan penatausahaan yang memerlukan banyak data.

Berbeda dengan SIPD di Indonesia, beberapa negara telah berhasil mengintegrasikan data dari sistem sebelumnya ke dalam platform baru. Kenya, misalnya, dengan *Integrated Financial Management Information System (IFMIS)*, mampu memigrasi data secara bertahap melalui penyesuaian format data dan pelatihan pengguna, yang meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran hingga 30% (Muthembwa, 2023).

Berdasarkan hal tersebut, SIPD dapat mengambil langkah serupa untuk memperbaiki integrasi dengan sistem sebelumnya maupun yang akan datang. Strategi yang dapat diterapkan mencakup pengembangan sistem untuk mempermudah migrasi data, pelatihan intensif bagi pengguna. Dengan langkah-langkah tersebut, SIPD dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah sekaligus meminimalkan risiko kesalahan data selama proses transisi.

6. Kepentingan Sistem

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki peran penting dalam mendukung tugas Sekretariat DPRD, khususnya dalam pengelolaan administrasi dan keuangan. SIPD berfungsi untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas pekerjaan di Sekretariat DPRD, berkontribusi pada kelancaran tugas penatausahaan, pelaporan keuangan, dan pengambilan keputusan yang lebih akurat. Oleh karena itu, peran SIPD tidak hanya sebagai alat bantu kerja, tetapi juga dalam pencapaian tujuan organisasi.

Namun, meskipun SIPD mengotomatisasi beberapa proses, sistem ini masih memerlukan pencatatan manual dalam beberapa aspek. Contohnya, Buku Kas Umum (BKU) harus dibuat di Excel, dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tetap menggunakan bentuk fisik untuk verifikasi antara data sistem dan manual. Pengguna juga harus mencetak, memindai, dan mengunggah berkas fisik, yang menambah beban kerja.

SIPD membantu dalam proses administratif seperti penerbitan SPP dan SPM secara digital, namun beberapa prosedur masih memerlukan tanda tangan basah dari pimpinan, yang memaksa pengguna untuk melakukan proses manual. Selain itu, pelaporan keuangan juga belum sepenuhnya terautomasi, karena dokumen Tanda Bukti Pembayaran (TBP) harus dipindai satu per satu, yang memperlambat alur kerja. Pengguna tetap mencatat secara manual untuk menghindari risiko kesalahan atau ketidakcocokan data, yang berbeda dengan sistem sebelumnya, SIPKD, yang sudah sepenuhnya digital.

Secara keseluruhan, meskipun SIPD memberikan kemudahan dalam beberapa aspek, sistem ini masih perlu perbaikan, terutama dalam mengurangi proses manual, agar dapat lebih optimal mendukung pengelolaan keuangan dan administrasi di Sekretariat DPRD.

Kualitas Pelayanan (*Service Quality*) Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Kualitas layanan dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sangat penting untuk memastikan kelancaran dan efektivitas sistem. Menurut McLean & Delone, (2003), kualitas layanan tidak hanya mencakup kualitas sistem itu sendiri, tetapi juga kontribusi pengembang dalam mengatasi kendala pengguna. Dalam konteks SIPD, Kemendagri sebagai pengelola sistem bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan implementasi yang sukses, dengan BPKAD Provinsi Jawa Barat sebagai

penanggung jawab di tingkat provinsi.

Untuk menilai kualitas layanan SIPD, terdapat empat aspek utama yang perlu diperhatikan: Keandalan (Reliability), Daya Tanggap (Responsiveness), Empati (Empathy), dan Jaminan (Assurance). Keandalan mengukur sejauh mana sistem dapat berfungsi dengan baik, daya tanggap menilai kecepatan respons terhadap masalah, empati mencakup perhatian terhadap kebutuhan pengguna, dan jaminan berhubungan dengan pengetahuan serta kepercayaan yang diberikan oleh BPKAD kepada pengguna.

Berdasarkan wawancara, saat terjadi gangguan atau masalah pada SIPD, Sekretariat DPRD biasanya segera menghubungi BPKAD untuk meminta bantuan. BPKAD umumnya merespons dengan cepat, memberikan informasi tentang status perbaikan, dan membantu menyelesaikan masalah yang dapat diatasi langsung. Namun, ada kendala saat perbaikan membutuhkan waktu lebih lama, terutama jika melibatkan penanganan di tingkat pusat, yang dapat menyebabkan sistem tidak dapat diakses selama beberapa jam atau hari.

Pelayanan BPKAD dalam menangani kendala SIPD dinilai cukup baik. BPKAD responsif dan ramah dalam menghadapi pengaduan pengguna, memberikan arahan untuk menunggu hingga sistem kembali normal. Namun, solusi yang diberikan seringkali terbatas pada arahan tanpa estimasi waktu perbaikan yang jelas, yang dapat menambah ketidakpastian bagi pengguna. Ketergantungan pada perbaikan pusat juga mencerminkan tantangan terkait keandalan SIPD, yang dapat mengganggu kelancaran administrasi di Sekretariat DPRD.

Meskipun demikian, BPKAD tetap berusaha memberikan pelayanan yang baik melalui komunikasi yang informatif dan sikap yang ramah. Informasi yang diberikan membantu pengguna merasa lebih tenang dalam menghadapi gangguan sistem. Namun, kelemahan muncul karena keterbatasan solusi yang diberikan, yang hanya berupa arahan untuk menunggu tanpa penjelasan lebih rinci mengenai estimasi waktu perbaikan. Ini menunjukkan tantangan dalam hal keandalan SIPD, yang berdampak pada kelancaran proses administrasi dan pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD.

Secara keseluruhan, meskipun pelayanan BPKAD sudah cukup baik dalam hal respons dan komunikasi, perbaikan berkelanjutan terhadap keandalan dan efisiensi SIPD sangat diperlukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan memastikan kelancaran operasional di Sekretariat DPRD. Keberlanjutan perbaikan sistem dan peningkatan kualitas layanan dari BPKAD diharapkan dapat memperkuat efektivitas SIPD dalam mendukung tugas administrasi dan pengelolaan keuangan di daerah.

Kegunaan (*Use*)/Maksud Penggunaan (*Intention to Use*) Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Dimensi lain dalam model efektivitas sistem informasi McLean & Delone, (2003) adalah kegunaan/maksud penggunaan. Maksud penggunaan merupakan dimensi penting dalam menggambarkan efektivitas sebuah sistem informasi, karena penggunaan sistem informasi yang sesuai dengan tujuannya dapat mempengaruhi pencapaian manfaat yang diharapkan dari sistem tersebut.

Meskipun Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan sistem informasi yang wajib digunakan oleh perangkat daerah salah satunya dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi dengan melihat maksud penggunaan dari SIPD menjadi hal yang penting dalam menggambarkan efektivitas SIPD di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Dalam menggambarkan maksud penggunaan terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui pola dari pengguna SIPD yang meliputi:

1. Jumlah Penggunaan (*Amount of Use*) dan Frekuensi Penggunaan (*Frequency of Use*)

Jumlah dan frekuensi penggunaan SIPD adalah indikator utama efektivitasnya dalam mendukung pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD. Jumlah penggunaan mencerminkan tingkat pemanfaatan sistem melalui transaksi dan akses fitur, sedangkan frekuensi penggunaan menunjukkan intensitas akses harian, mingguan, atau bulanan. Keduanya menggambarkan tingkat ketergantungan pengguna pada SIPD.



Frekuensi penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat bervariasi dan bergantung pada beban kerja serta periode pelaporan. Penggunaan SIPD paling intens terjadi pada awal dan akhir bulan, terutama untuk proses verifikasi data keuangan, dengan durasi penggunaan mencapai hingga 6 jam per hari. Pada hari biasa yang lebih tenang, durasi penggunaan menurun menjadi sekitar 2 jam per hari. Dalam sehari, terdapat sekitar 50-100 transaksi yang perlu diverifikasi, terutama ketika BPP menyelesaikan penginputan data selama satu bulan penuh. Jika transaksi dilakukan secara bertahap, jumlah harian dapat lebih rendah tetapi tetap signifikan. Selain itu, pengajuan rutin seperti gaji pegawai dan anggota DPRD biasanya dilakukan pada pertengahan atau akhir bulan, sementara pengajuan barang dan jasa dilakukan secara berkala dengan jumlah transaksi harian yang bervariasi, mulai dari dua transaksi atau lebih.

Pada periode pelaporan, intensitas penggunaan SIPD meningkat tajam hingga 8 jam per hari. Dalam waktu setengah hari, pengumpulan dan pengolahan data dapat mencakup ratusan transaksi untuk menyusun laporan keuangan. Meski demikian, pengecekan akhir terhadap data masih dilakukan secara manual menggunakan Excel untuk memastikan akurasi. SIPD sendiri belum memiliki fitur pemantauan jumlah pekerjaan harian secara real-time. Pemantauan transaksi harian membutuhkan langkah tambahan, seperti penarikan data dari akun PA atau pencatatan manual menggunakan Excel. Namun, SIPD menyediakan register bulanan untuk melacak pengajuan SPP dan SPM, sehingga pengguna tetap dapat memantau transaksi bulanan secara terstruktur.

Secara keseluruhan, SIPD memainkan peran penting dalam pengelolaan data keuangan,

terutama pada periode pelaporan dan saat beban kerja tinggi. Intensitas penggunaannya sangat bergantung pada jenis pengajuan yang diproses serta metode kerja yang diterapkan. Meskipun SIPD menjadi alat utama dalam administrasi keuangan, keterbatasan fitur pemantauan harian menunjukkan perlunya langkah manual tambahan untuk memastikan kelancaran dan akurasi proses administrasi di Sekretariat DPRD.

Gabungan antara frekuensi penggunaan dan jumlah penggunaan SIPD sangat penting untuk mendukung efektivitas penggunaan sistem ini. Intensitas penggunaan pada periode pelaporan dan jumlah transaksi yang diproses setiap hari menjadi faktor kunci dalam kelancaran administrasi keuangan. Namun, terbatasnya fitur pemantauan transaksi harian dalam SIPD menunjukkan adanya kebutuhan untuk pengembangan lebih lanjut agar penggunaan sistem menjadi lebih efisien dan terukur, serta memudahkan pengguna dalam memantau dan mengelola pekerjaan mereka secara lebih *real-time*.

2. Sifat Penggunaan (*Nature of Use*)

Efektivitas SIPD dapat dilihat dari sifat penggunaannya, yang mencakup penggunaan rutin, darurat, dan untuk tugas tertentu. Penggunaan rutin mencerminkan integrasi SIPD dalam kegiatan administrasi sehari-hari, terutama dalam pengelolaan keuangan, seperti proses verifikasi dan pelaporan. Intensitas penggunaan cenderung tinggi pada awal dan akhir bulan, mencapai 4-6 jam per hari, sementara pada hari biasa hanya sekitar 2 jam.

Durasi penggunaan SIPD sangat bergantung pada volume pengajuan dokumen, seperti SPP dan SPM, terutama untuk pengeluaran rutin seperti gaji. Sebagai sistem wajib dalam pengelolaan keuangan, SIPD mendukung pencatatan, verifikasi, dan pelaporan, meskipun intensitasnya berfluktuasi sesuai beban kerja.

Namun, SIPD belum sepenuhnya otomatis karena beberapa proses, seperti pengecekan data, masih memerlukan Excel. Hal ini mengindikasikan perlunya pengembangan sistem untuk mengurangi ketergantungan pada metode manual dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai fungsi administrasi.

3. Kesesuaian Penggunaan (*Appropriateness of Use*) dan Luasnya Penggunaan (*Extent of Use*)

Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari kesesuaian dan luasnya penggunaan dapat dilihat dari dua indikator lainnya seperti Kesesuaian Penggunaan dan Luasnya Penggunaan. Kesesuaian Penggunaan berfokus pada sejauh mana SIPD digunakan sesuai tujuan, seperti pengelolaan keuangan daerah dan pelaporan anggaran. Efektivitasnya terlihat jika SIPD mempermudah dan mempercepat proses pengelolaan keuangan serta meningkatkan penggunaan dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Luasnya Penggunaan mengukur penerapan SIPD di berbagai bagian DPRD, seperti administrasi, anggaran, dan pelaporan. Efektivitasnya tercermin jika sistem ini mendukung fungsi-fungsi tersebut tanpa penyesuaian manual.

Berdasarkan wawancara, efektivitas SIPD di Sekretariat DPRD menunjukkan keterbatasan dalam Kesesuaian Penggunaan. Pengguna merasa SIPD belum memenuhi kebutuhan spesifik mereka, terutama dibandingkan dengan SIPKD yang menawarkan fitur lebih lengkap. Misalnya, SIPKD memungkinkan pencatatan transaksi RC Bank yang lebih fleksibel, sementara SIPD membutuhkan pencatatan pelimpahan dana secara bersamaan, yang sering kali tidak sesuai dengan praktik penyaluran bertahap. Walaupun SIPD lebih mudah diakses, banyak pengguna merasa sistem ini kurang efektif dalam mendukung administrasi yang rinci dan berharap ada pembaruan fitur agar tidak perlu beralih ke sistem baru.

Dari segi Luasnya Penggunaan, SIPD telah diterapkan di berbagai bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, termasuk Bagian Program dan Keuangan, Bagian Persidangan, Bagian Fasilitasi Penganggaran, dan Bagian Umum. Setiap bagian menggunakan SIPD melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk menginput transaksi dan pencatatan keuangan. Meskipun SIPD telah digunakan di seluruh bagian, sistem ini masih memerlukan penyesuaian manual dalam verifikasi dan pengelolaan laporan keuangan, yang menunjukkan bahwa efektivitasnya dalam mendukung proses administrasi antarbagian belum optimal.

Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*) Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Dimensi penting lainnya dalam menilai efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam model McLean & Delone, (2003) adalah kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna diukur berdasarkan pengalaman mereka dalam menggunakan sistem, yang mencerminkan sejauh mana harapan dan kebutuhan mereka terpenuhi. Evaluasi kepuasan pengguna berfokus pada kesesuaian antara ekspektasi awal dengan kenyataan yang dialami dalam penggunaan SIPD. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepuasan pengguna dapat dikategorikan dalam tiga aspek utama, yaitu proses penatausahaan dan pelaporan keuangan, sistem (fitur dan stabilitas), serta dukungan dari BPKAD.

Berdasarkan hasil wawancara, efektivitas SIPD dalam hal kepuasan pengguna menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan teknis, sistem ini umumnya diterima dengan baik. SIPD dapat menyediakan laporan yang sesuai dengan kebutuhan penatausahaan meskipun masih sering terjadi error, terutama dalam penginputan dan pencocokan data. Meskipun demikian, sistem ini telah memenuhi ekspektasi pengguna dalam mendukung tugas harian mereka, dengan kualitas output yang berkontribusi pada kelancaran proses administratif.

Kepuasan terhadap SIPD tercermin dari kemampuan sistem yang memadai untuk memfasilitasi tugas sehari-hari. Fitur-fitur yang ada dinilai memenuhi kebutuhan dasar operasional penatausahaan, namun stabilitas dan kinerja sistem terkadang mengalami kendala, seperti kelambatan atau error saat menginput data penting seperti SPP atau SPM. Kendala ini mempengaruhi kelancaran pekerjaan dan efisiensi waktu pengguna, meskipun tingkat kepuasan pengguna secara keseluruhan masih tergolong cukup baik.

Dukungan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berperan penting dalam meningkatkan kepuasan pengguna terhadap SIPD. BPKAD cukup responsif dalam menangani keluhan teknis terkait SIPD, menunjukkan komitmen mereka untuk membantu pengguna. Namun, beberapa kendala teknis belum sepenuhnya terselesaikan dengan efektif, terutama saat perbaikan sistem

yang memerlukan waktu lama. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk meningkatkan kualitas layanan dukungan, baik dalam kecepatan maupun efektivitas penyelesaiannya. Dukungan BPKAD dalam menangani kendala ini dinilai cukup memadai, meskipun perbaikan dalam efektivitas penyelesaian masalah diperlukan. Dukungan ini memberikan dampak positif pada pengalaman pengguna, meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem.

Berdasarkan wawancara, tingkat kepuasan pengguna untuk setiap aspek adalah cukup puas. Secara keseluruhan, SIPD telah berkontribusi secara signifikan dalam pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD. Namun, stabilitas sistem dan efisiensi layanan dukungan masih perlu ditingkatkan. Perbaikan stabilitas sistem, efektivitas layanan dukungan, dan peningkatan pelatihan, SIPD dapat lebih mendukung efektivitas dan meningkatkan kepuasan pengguna dalam jangka panjang. Dengan mengatasi kendala tersebut, tingkat kepuasan pengguna diharapkan dapat meningkat sehingga mendukung kelancaran administrasi keuangan secara lebih optimal.

Manfaat Bersih (*Net Benefits*) Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Dimensi terakhir menurut (McLean & Delone, 2003) dalam menilai efektivitas SIPD di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat adalah manfaat bersih yang dihasilkan oleh sistem ini, yang berkaitan langsung dengan tujuan utamanya yaitu mengintegrasikan data dari berbagai proses, mulai dari perencanaan, pengelolaan keuangan, hingga pelaporan keuangan daerah di seluruh Indonesia. SIPD dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan efisiensi kerja dan peningkatan kualitas pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan integrasi data yang menyeluruh, SIPD memungkinkan akses data yang lebih akurat dan efisien di setiap tahapan administrasi keuangan, dari tahap perencanaan hingga laporan akhir. Ini menciptakan keselarasan standar pengelolaan keuangan di tingkat nasional, sehingga memudahkan pemantauan oleh pemerintah pusat dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Manfaat bersih dari SIPD tidak hanya berupa akses yang lebih cepat dan akurat terhadap data, tetapi juga dampak jangka panjang yang meliputi peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan di daerah. SIPD membantu menyederhanakan proses, meminimalkan duplikasi data, dan mendukung pemantauan keuangan yang terintegrasi, sehingga memberikan nilai tambah bagi organisasi. Dalam menggambarkan manfaat yang dihasilkan dari SIPD dilihat berdasarkan dua (dua) aspek, yaitu menghemat waktu serta dampak bagi individu dan organisasi.

Dimensi efektivitas manfaat bersih (*Net Benefits*) dari penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, yang mencakup penghematan waktu, dampak pada individu, dan dampak organisasi, menunjukkan hasil yang bervariasi.

Dari sudut pandang penghematan waktu, SIPD terbukti membantu mempercepat proses verifikasi data, terutama dalam penarikan data. SIPD memungkinkan penghematan waktu yang signifikan dalam aspek verifikasi, yang membuat proses menjadi lebih efisien. Namun, tantangan masih muncul pada tahap input data, seperti pencatatan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dan BKU (Buku Kas Umum), yang masih dilakukan secara manual dan menghambat optimalisasi efisiensi waktu secara keseluruhan. Di sisi lain, tim akuntansi pelaporan keuangan justru merasakan bahwa penggunaan SIPD belum efektif dalam menghemat waktu karena masih memerlukan banyak penyesuaian dan langkah manual.

Dampak SIPD terhadap individu menunjukkan adanya beban kerja tambahan. Bagian verifikasi sering kali harus lembur, terutama ketika terjadi kendala teknis atau error dalam sistem, yang menyebabkan pekerjaan harus diselesaikan di luar jam kerja. Begitu pula dengan tim pelaporan keuangan, yang mengungkapkan bahwa proses input data yang panjang mengharuskan mereka lembur karena masih banyaknya dokumen yang harus diproses satu per satu, termasuk pemindaian berkas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun SIPD bertujuan meningkatkan efisiensi, kenyataannya implementasi sistem ini masih menambah beban kerja individu karena adanya keterbatasan teknis yang belum teratasi.

Dari perspektif organisasi, SIPD memberikan dampak positif dengan memperlancar administrasi, namun tetap menghadapi kendala. SIPD memfasilitasi proses administrasi, termasuk dalam pengelolaan dana GU (Ganti Uang) bagi anggota DPRD. Akan tetapi, ketika terjadi keterlambatan input atau kesalahan pada SIPD, hal ini menimbulkan ketidakpuasan dari anggota DPRD yang bergantung pada ketepatan waktu dalam proses pengajuan dan pelaporan keuangan. Selain itu, bagian pelaporan keuangan mencatat bahwa keterlambatan dalam pengumpulan bukti transaksi dan pengajuan laporan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan untuk memastikan bahwa sistem mendukung kebutuhan organisasi secara optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa SIPD belum sepenuhnya berjalan efektif. Meskipun SIPD telah mendukung pengelolaan data secara terorganisir dengan aksesibilitas yang baik, penggunaan SIPD masih belum optimal, terutama pada dimensi Kualitas Informasi dan Kualitas Sistem. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian Setyawan (2023) yang menunjukkan bahwa aplikasi SIPD di Kabupaten Gianyar belum efektif karena adanya masalah dalam akurasi dan kelengkapan informasi, serta proses input manual yang menyebabkan kesalahan. Masalah serupa juga ditemukan dalam penelitian Pandan Wangi (2023), yang menunjukkan bahwa SIPD di Kabupaten Semarang belum mampu menyediakan informasi yang akurat dan lengkap, bahkan memerlukan penggunaan sistem ganda untuk mencadangkan data. Keterbatasan fitur SIPD dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya (SIPKD) juga menjadi hambatan dalam meningkatkan efektivitas, seperti yang ditemukan dalam penelitian Nalle (2023), yang menunjukkan bahwa kualitas sistem SIPD di Kabupaten Kupang masih belum optimal karena kurangnya pelatihan dan prosedur yang jelas.

Terkait dengan dimensi Kualitas Pelayanan, meskipun BPKAD responsif dalam menangani kendala teknis, proses perbaikan

yang memakan waktu lama memperlambat penyelesaian masalah, hal ini juga tercermin dalam hasil penelitian Setyawan (2023) yang menemukan bahwa pemerintah pusat belum memberikan solusi cepat atas masalah yang dilaporkan oleh BPKAD. Mengenai Kegunaan dan Kepuasan Pengguna, meskipun terdapat peningkatan dibandingkan sistem sebelumnya, ketidakstabilan server dan proses manual masih menjadi kendala, hal ini juga sejalan dengan temuan Pandan Wangi (2023) yang mengungkapkan bahwa SIPD di Kabupaten Semarang mengalami masalah ketidakstabilan server dan infrastruktur yang belum memadai. Untuk meningkatkan efektivitas SIPD, pengembangan fitur integrasi data, peningkatan stabilitas sistem, serta pelatihan dan pendampingan teknis menjadi langkah yang perlu diambil, yang juga sejalan dengan rekomendasi yang ada dalam penelitian terdahulu, yang menekankan perlunya pelatihan dan peningkatan infrastruktur teknologi untuk mendukung kelancaran penggunaan SIPD.

Terlepas dari berbagai kendala yang dialami oleh pengguna, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki manfaat signifikan, seperti pengelolaan data yang terorganisir serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. SIPD mempermudah koordinasi antarbagian melalui integrasi data dan memberikan efisiensi dalam beberapa proses administrasi keuangan, terutama pada pelaporan dan verifikasi. Selain itu, responsivitas BPKAD terhadap kendala teknis menjadi nilai tambah meskipun masih ada tantangan dalam penyelesaian masalah. Meskipun belum sepenuhnya optimal, SIPD telah memberikan dasar yang kuat untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah secara lebih terstruktur dan transparan.

Untuk meningkatkan efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, diperlukan strategi perbaikan yang terencana, melibatkan langkah-langkah kolaboratif antara pemerintah pusat sebagai pengembang sistem dan pengguna di tingkat daerah. Pertama, pemerintah pusat perlu meningkatkan stabilitas sistem secara berkala, terutama pada saat periode tertentu seperti akhir bulan dan akhir tahun, dengan

memastikan kapasitas server memadai dan memperkuat mekanisme pengelolaan beban kerja sistem. Kedua, fitur integrasi data antarsistem harus dikembangkan untuk mempermudah transisi ke SIPD RI, yang akan digunakan sebagai sistem selanjutnya. Fitur ini harus mampu melakukan transfer data otomatis dari SIPD ke SIPD RI, sehingga mengurangi risiko kesalahan, mempersingkat waktu migrasi, dan mempermudah pengguna. Ketiga, sistem baru perlu dirancang untuk mendukung seluruh proses pengelolaan keuangan secara menyeluruh dengan menambahkan menu atau fitur yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna secara lebih efisien dan efektif. Keempat, pengguna SIPD diharapkan lebih proaktif dengan memproses data secara rutin, bukan hanya di akhir bulan, untuk mengurangi risiko error sistem yang sering terjadi pada periode pelaporan tinggi. Terakhir, pelatihan intensif dan pendampingan teknis harus diberikan kepada seluruh pengguna di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat sebelum implementasi SIPD RI. Hal ini bertujuan untuk memastikan mereka memahami fitur-fitur baru, alur kerja yang berbeda, dan dapat memanfaatkan sistem secara maksimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengelolaan keuangan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Anggaran. (2023). *Rapat Paripurna DPR RI: Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR RI Terhadap RUU APBN 2024 beserta Nota Keuangannya*. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Media/eeee47a-5bda-4447-bddb-951fba7150f2>
- Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. (2023, August). *Dukung Penggunaan SIPD RI, Kemendagri Bangun Sinergi dengan Kementerian/Lembaga*. <https://keuda.kemendagri.go.id/berita/deta-il/4408-dukung-penggunaan-sipd-ri--kemendagri-bangun-sinergi-dengan-kementerian/lembaga>
- Kadir, A. (2014). *Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi*. <https://doi.org/10.13140/2.1.2637.6328>
- Magrid Rompas, L. (2020). *Penerapan Teknologi Pada Sistem Informasi Manajemen. Volume 17*.
- McLean, E., & Delone, W. (2003). *The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update*. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
- Muthembwa, K. (2023). Public Financial Management Reforms in Kenya: Strengthening Transparency and Accountability. *World Bank Group*. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/12/12/kenya-afe-secures-support-to-further-strengthen-transparency-in-public-finance-management>
- Nalle, M. O. (2023). *Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran Di Kabupaten Kupang*.
- Pambudi, A. (2005). *EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER* (Vol. 35). <https://doi.org/10.21831/jk.v35i2.5098>
- Pandan Wangi, P. (2023). *EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH*.
- Ramadhan, R., Arifianti, R., & Riswanda. (2019). Implementasi E-Government Di Kota Tangerang Menjadi Smart City (Studi Kasus Aplikasi Tangerang Live). *RESPONSIVE: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 2, 142. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/responsive.v2i3.26083>
- Rusdiana, H. A., Moch, M. M., Irfan, S. T., Kom, M., & Ramdhadi, H. M. A. (2014). *Sistem Informasi Manajemen Sistem Informasi Manajemen Pustaka Setia Pengantar: Penerbit PUSTAKA SETIA*

Bandung.

- Ryas, M. (2023). *EVALUASI PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DENGAN MODEL CIPP DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN ACEH TENGAH PROVINSI ACEH*.
- Sahfitri, V. (2012). Pengukuran Efektivitas Sistem Informasi. *Jurnal Ilmiah Matrik*, 14, 206.
- Setyawan, I. K. J. (2023). *EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH*.
- Shara Ningsih, K., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi Fiskal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5389/ht tp>
- Sub Bagian Hukum BPK Sumatera Selatan. (2019). *SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 70 TAHUN 2019*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Yunitarini, R. (2021). *Sistem Informasi : Konsep dan Pengembangan*. CV. Literasi Nusantara Abadi. <https://perpustakaan.co.id/view/buku.ks/Z2RJOXc1QmwxeDk1U0NJVm5UWksxQT09/sistem-informasi--konsep-dan-pengembangan>